

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2017/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Zita Asih Suprastiwi
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
3. NHK : 403011

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 375.770.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di Bogor, HASIL SENDIRI Rp. 102.914.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/36 m² di Bogor, HASIL SENDIRI Rp. 129.668.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/40 m² di Bogor, HASIL SENDIRI Rp. 143.188.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, Honda AFP12W21CO3M/T/ SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 190.423.170**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 632.693.170

III. HUTANG Rp. 84.495.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 548.198.170

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Mei 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.